KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 216/KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/III/2026

TENTANG

TIM PENGAWAS ANTAR BIDANG PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

MENIMBANG :

a. Bahwa berdasarkan berdasarkan assement Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan system dan pelaksaaannya, untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) di lingkungan peradilan umum;
b. Bahwa pelaksanaan program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tangguH (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja di Pengadilan Negeri Balikpapan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Tim Pengawas Antar Bidang Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Balikpapan ;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administarsi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
12. International Framework for Court Excellent / IFCE ;
13. ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit ;
14. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu ;
15. ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan TangguH (AMPUH);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Tim Pengawas Antar Bidang Program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 56/KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/VII/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan kemudian menetapkan program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH) sebagai salah satu bentuk pembinaan Direktorat Badan Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Hakim yang namanya dan tugasnya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Pengawas Antar Bidang program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH);

KETIGA : Tujuan dari program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

KEEMPAT : Ruang lingkup program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

KELIMA : Pelaksanaan Pengawasan Antar Bidang dilaksankan pada tanggal 6-10 April 2026 dan program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH) mengacu pada :

1. Pedoman sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH)
2. Lembar Assesmen sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH)
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH), Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

KEENAM : Memberlakukan si AMPUH sebagai aplikasi yang digunakan pelaksanaan program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan tanggUH (AMPUH);

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Balikpapan
Pada Tanggal : 10 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PN BALIKPAPAN
NOMOR : 216/KPN.W18.U2/SK.HK1.2.5/III/2026
TANGGAL 10 Maret 2026

TIM PENGAWAS ANTAR BIDANG PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Pembina	:	Hasanuddin M, SH.,MH
Koordinator Pengawas	:	Ahmad Shuhel Nadjir, SH.,MH

DAFTAR NAMA PENGAWAS ANTAR BIDANG

NO	BIDANG PENGAWASAN	NAMA HAKIM PENGAWAS	JABATAN DI TIM PENGAWAS BIDANG
1.	Ketua	Imran Marannu I, S.H.,M.H Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H	Hakim Pengawas Bidang
2.	Wakil Ketua	Agustinus, S.H Ahmad Gazali, S.H.,M.H	Koordinator Pengawas
3.	Panitera	Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H	Koordinator Pengawas
4.	Sekretaris	Abdul Rasyid, S.H.	Koordinator Pengawas
5.	Kepaniteraan Pidana	Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H	Hakim Pengawas Bidang Perdata
6.	Kepaniteraan Perdata	Indah Novi Susanti, S.H.,M.H	Hakim Pengawas Bidang Hukum
7.	Kepaniteraan Hukum	Andri Wahyudi, S.H	Hakim Pengawas Bidang Pidana
8.	Panitera Pengganti Dan Jurusita	Anak Agung Ayu Sri S, S.H.,M.H	Hakim Pengawas Bidang PTSP
9.	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Annender Carnova, SH.,M.Hum	Hakim Pengawas Bidang KP
10.	Sub Bagian PTIP	Erhammudin, S.H.,M.H	Hakim Pengawas Bidang Umum Keu.
11.	Sub Bagian KP dan Ortala	Risdianto, SH	Hakim Pengawas Bidang PTIP
12.	Bidang PTSP	Zaufi Amri, S.H.,M.H Ari Siswanto, S.H.,M.H	Hakim Pengawas Bidang

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.